



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD UJANG SUGIONO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 105817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **685.100.000**

1. Tanah Seluas 609 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 23.000.000
2. Tanah Seluas 788 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 26.100.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/60 m2 di KAB / KOTA
KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 455.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di KAB / KOTA
KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 180.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **168.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA CRYPTON SEPEDA MOTOR Tahun 2000,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 142.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERTAHAGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.732.691.654**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.586.291.654**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.586.291.654

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.